

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya untuk mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat diantaranya dengan melakukan pembangunan ekonomi. Kegiatan ekonomi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Kriteria utama pemilihan sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah kemiskinan (Pantjar Simatupang dan Saktyahu K 2003), (H Harlik 2013).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas dalam rencana jangka menengah nasional, meliputi lima sasaran pokok, yaitu: pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan kualitas manusia, perbaikan mutu lingkungan hidup, dan pengelolaan sumberdaya alam serta peningkatan infrastruktur. Implementasinya, yang menjadi prioritas utama pembangunan nasional diberikan kepada pemeliharaan kesejahteraan rakyat, penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. Implementasi kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pengurangan tingkat kemiskinan yang pada dasarnya merupakan bentuk masalah yang muncul

dalam kehidupan masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan. Garis kemiskinan menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dimana dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan, posisi dimana manusia berada dalam lingkungan sekitar (Anwar dan Adang 2013).

Indonesia merupakan termasuk negara yang menjadikan kesejahteraan bangsanya sebagai tujuannya. Rumusan kesejahteraan dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kesejahteraan menjadi judul khusus pada Bab IV yang didalamnya terdapat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial. Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) dikenal

di negara lain dengan istilah conditional cash transfer (CCT) atau bantuan langsung tunai bersyarat. Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM (Rina Agustina 2017).

Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Sumba Tengah tahun 2020 – 2024.

Tabel 1. 1 Perkembangan penduduk miskin 2020 – 2024

TAHUN	PRESENTASE KEMISKINAN
2020	34,49 %
2021	34,27 %
2022	32,51 %
2023	31,78 %
2024	30,84 %

Sumber : BPS Kabupaten Sumba Tengah 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang membutuhkan penanganan holistik. Di Kabupaten Sumba Tengah, tingkat kemiskinan yang tercatat pada tahun 2020 mencapai 34,49% menunjukkan tingginya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun, data terbaru menunjukkan adanya tren penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap hingga mencapai 30,84% pada tahun 2024. Penurunan sebesar 3,65 poin persentase ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, Hal tersebut dikarenakan upaya

pemerintah dalam menekan tingkat kemiskinan. Adanya RTS (Rumah Tangga Sasaran) maka dapat ditentukan program-program pemerintah untuk penduduk miskin. RTS didapat dari hasil sensus BPS sedangkan jumlah penduduk miskin didapat dari survey sosial ekonomi nasional untuk evaluasi program pemerintah di bidang pengentasan kemiskinan. Dari data RTS yang diperoleh akan digunakan untuk program bantuan sosial, diantaranya yaitu adanya bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sehat (KKS), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Saat ini jumlah Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah semakin menurun. Hal tersebut didukung oleh program bantuan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi tingkat kemiskinan. Bantuan sosial tersebut salah satunya yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) dimana penerima PKH masuk kedalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurut Dinas Sosial, jumlah KPM penerima PKH di Kabupaten Sumba Tengah mencapai 6.800 jiwa. Sementara di setiap kecamatan terdapat pendamping PKH yang berperan untuk mendampingi peserta penerima PKH. Pendamping PKH di kabupaten Sumba Tengah sejumlah 28 orang pendamping dan 1 orang koordinator. Meskipun program keluarga harapan setiap tahunnya mengalami graduasi yang berarti penerima PKH sudah keluar dari garis kemiskinan dan mandiri secara ekonomi, bukan berarti pengelolaan PKH sudah berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut hasil penelitian lain, menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap pengurangan beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi adanya tantangan utama, seperti Ketergantungan pada bantuan, Sebagian penerima manfaat tidak memanfaatkan bantuan untuk berinvestasi pada kegiatan yang bersifat produktif, sehingga menghambat kemandirian ekonomi (Lestari et al. 2021).

Berkaitan dengan pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana efektivitas pengelolaan Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan bantuan berupa uang merupakan aspek yang menarik untuk diteliti, karena pengelolaan keuangan merupakan salah satu bentuk nyata bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bisa digunakan untuk membantu membeli kebutuhan setiap harinya atau melakukan proses transaksi jual beli (Oleh NM Nikmah 2023).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian tentang “Analisis Potensi Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Desa Uumbu Pabal, Kecamatan Uumbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah.

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui dan Menganalisis Potensi Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Potensi Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tenggara ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk menganalisis dan mengetahui Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau informasi dalam mendukung penelitian selanjutnya tentang bagaimana Potensi Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, oleh para akademisi untuk menunjang dunia penelitian pada bidang yang sama.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan menjadi literatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

b. Bagi Dinas Sosial

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan dapat membantu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.